

# **Sumberdaya Arkeologi Menuju Industri Pariwisata di Maluku: Masalah, Peluang, Tantangan dan Solusinya**

Wuri Handoko<sup>1</sup>

## *Abstract*

*Wilayah Maluku memiliki kontribusi besar sebagai daerah yang banyak menyimpan sumberdaya warisan budaya (cultural heritage). Namun sejak terpecah menjadi dua provinsi, masing-masing mengejar PAD, yang kemudian terkesan menelantarkan potensi sumberdaya budaya tersebut. Besarnya potensi sumberdaya budaya dan arkeologi itu sesungguhnya dapat dikembangkan menjadi obyek industri pariwisata. Namun hal ini perlu dilakukan melalui perencanaan yang matang yang diawali dengan menjaring aspirasi dari bawah (bottom up). Hal ini untuk memperoleh dukungan kolektif public, sebagai salah satu syarat agar industri pariwisata dapat berkembang. Bagaimanapun masyarakat sangat berhak, mengingat sumberdaya arkeologi justru banyak dijumpai diwilayah pemukiman masyarakat setempat. Namun demikian untuk mengembangkan sebuah industri wisata, perlu dilakukan melalui berbagai upaya skala prioritas mengingat Maluku masih dalam proses pemulihan social.*

**Kata Kunci:** Sumberdaya Arkeologi, Industri, Pariwisata, Perencanaan, Skala Prioritas

## **Pendahuluan**

Dunia mengenal Indonesia sebagai Negara yang kaya warisan budaya (cultural heritage). Pernyataan ini bukan sekedar retorika belaka, namun senyatanya telah memperlihatkan, wilayah yang sangat luas itu, dipenuhi oleh peninggalan budaya masa lampau. Semua masa yang terbagi dalam pembabakan sejarah – prasejarah, klasik, Islam, kolonial, revolusi - ada bukti tinggalannya. Bahkan seperti yang disebutkan Hendro Soewoto, staf pada Assiten Deputy Urusan Litbang Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, tiga warisan dunia (world Heritage) terdapat di Indonesia yaitu: Candi Borobudur (1991), Kompleks candi Prambanan (1991) dan situs Prasejarah Sangiran (1996).

---

<sup>1</sup> Staf Peneliti Balai Arkeologi Ambon

Belum lagi yang ada di laut, sampai sebelum abad XX telah terdeteksi sekitar 463 kapal yang diduga memuat benda berharga tenggelam di perairan Nusantara. (www.arkeologi.net).

Kepulauan Maluku, merupakan salah satu wilayah di Indonesia, yang juga kaya tinggalan budaya masa lampau. Kepulauan Maluku kini telah terbagi menjadi dua provinsi yang masing-masing memiliki kontribusi warisan budaya yang besar terhadap Indonesia. Sejak satu sama lain, baik Maluku maupun Maluku Utara berdiri menjadi propinsi sendiri, maka masing-masing mengelola dan membangun daerahnya sendiri. Tak dapat dipungkiri, salah satu yang terpenting dalam perubahan ini yakni, masing-masing daerah berorientasi pada Peningkatan pendapatan Asli Daerah untuk memompa laju pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan dalih ini, berbagai upaya eksploitasi lingkungan dilakukan. Salah satu dampak negatif dari upaya ini, banyak kasus justru merugikan daerah sendiri, sebab laju eksploitasi lingkungan yang tak terarah dan terkendali. Berbagai kasus kerusakan hutan, telah banyak terjadi, bahkan meningkat pada masa otonomi daerah. Kasus illegal Logging, tak dapat disangkal biasa terjadi, dan penanganannya serba tak tuntas. Di laut, illegal dan destruktif fishing, juga bukan hal baru. Di sisi lain, akibat lemahnya teknologi penangkapan ikan oleh nelayan tradisional di tambah regulasi yang tak berpihak pada masyarakat, nelayan tradisional tersingkir.

Pokoknya, pemerintah Daerah dan segenap lapisan masyarakat perlu segera menyikapi hal ini. Sesungguhnya berbagai upaya alternatif dapat dikembangkan. Salah satunya yakni, mengembangkan berbagai sektor pembangunan. Berbagai sektor perlu diberdayakan secara merata, agar menutupi berbagai ketimpangan yang ada. Ego sektoral sudah tentu harus dikikis. Dewasa ini, salah satu sektor penting yang kerap kali menjadi tumpuan pembangunan adalah sektor pariwisata. Tercatat sektor ini pernah menjadi primadona Indonesia dalam perolehan devisa negara. Bahkan pada dasawarsa tahun 1990an sektor ini menjadi primadona kedua setelah sektor minyak dan gas.

Sekali lagi, Kepulauan Maluku, kaya sumberdaya budaya, yang potensial untuk dikembangkan. Hal ini ditekankan untuk memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam disiplin ilmu arkeologi, mengenal model pengelolaan sumberdaya budaya dan atau sumberdaya arkeologi yang disebut Cultural Resource Managemen

(CRM) atau Manajemen Sumberdaya Budaya (MSB) yang kemudian dipersamakan dengan Manajemen Sumberdaya Arkeologi (MSA) karena kajian dan perhatian utamanya pada tinggalan arkeologi (Tanudirjo, 2004: 2). Munculnya paradigma ini mengingat kesadaran bahwa sumberdaya arkeologi merupakan sumberdaya bersifat :

- non-renewable (tak terbaharui)
- irreversible (tak dapat diubah)
- finite (terbatas),
- Fragile (rapuh) oleh karena itu patut dilestarikan (Atomosudiro 2006, Tanudirjo, 2004 dan 2006)

McGimsey dan Davis (1977), misalnya, menulis:

“...karena sumberdaya arkeologi bersifat tak teperbaharui untuk penggal waktu tertentu, maka ada suatu kebutuhan yang mendesak untuk melestarikan (to conserve) dan mengelola (to manage) sumberdaya yang terbatas itu agar terjamin pemanfaatannya selama mungkin”. Yang dimaksud konservasi adalah upaya untuk mendekati arkeologi berdasarkan filosofi yang menekankan pada perlindungan, pelestarian, dan atau pemanfaatan yang terkelola terhadap sumberdaya budaya untuk kepentingan generasi mendatang”. (Tanudirjo, 2004 :3, 2006)

Sementara itu, Schiffer dan Gumerman (1977), yang menyamakan manajemen sumberdaya budaya dengan *Conservation Archaeology*, menyatakan bahwa

*Arkeologi Konservasi adalah kerja arkeologi yang menandakan tanggungjawab ahli arkeologi untuk bekerja dengan filosofi pengelolaan sumberdaya arkeologi jangka panjang yang diarahkan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi ilmu pengetahuan, sejarah dan masyarakat.”* (ibid).

Seorang pelopor Manajemen Sumberdaya Arkeologi lainnya, Fowler (1982) memberikan pengertian yang lebih khusus. MSA adalah upaya menerapkan kemampuan pengelolaan (merencanakan, mengatur, mengarahkan, mengendalikan, dan evaluasi) untuk mencapai tujuan pelestarian dengan melalui proses politis untuk melestarikan aspek-aspek penting dari warisan budaya kita untuk kepentingan masyarakat (Amerika). Cleere (1990) menjelaskan bahwa MSA mempunyai dasar filosofi yang mengkaitkan kegunaan warisan budaya itu untuk jati diri (*cultural identity*) yang dikaitkan dengan fungsi pendidikan, manfaat

ekonomis lewat kepariwisataan, dan fungsi akademis untuk menjaga dan menyelamatkan basis data tentang sumberdaya tersebut.(ibid).

Penjelasan para ahli bidang pengelolaan sumberdaya arkeologi tersebut memfokuskan perhatiannya atas pentingnya sumberdaya arkeologi bagi kepentingan masyarakat. Prakteknya, sumberdaya tersebut perlu dikembangkan selain untuk pendidikan juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata. Pemanfaatan melalui pariwisata merupakan pilihan model pelestarian yang tepat. Karena pariwisata merupakan model pemanfaatan dan pelestarian yang pada hakekatnya untuk kepentingan masyarakat.

Melalui pariwisata potensi-potensi lain yang ada di kawasan tersebut juga akan memperoleh peluang untuk berkembang sebagai kelengkapan penting dalam suatu sistem industri (pariwisata). Prinsipnya adalah, pemanfaatan pariwisata untuk mendukung pelestarian warisan budaya. Atau dengan kata lain pariwisata yang berwawasan pelestarian. Sebagai landasan pengembangan pariwisata budaya, perlu memperhatikan berbagai isu yang mempengaruhinya. Pembangunan berkelanjutan juga mesti diterapkan dalam sektor pariwisata. Pariwisata berkelanjutan (*smart tourism*) karena berbasis pada aspek konservasi lingkungan dan budaya, aspek peningkatan kualitas kehidupan komunitas dan aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat (Ardiwidjaya, 2005 : 86). Meski besarnya celah positif pemanfaatan sumberdaya arkeologi sebagai obyek pariwisata, namun juga bisa menimbulkan dampak negatif, oleh karena itu catatan penting untuk ini, ialah pemanfaatan sumber daya arkeologi sebagai obyek wisata tetap mempertahankan keasliannya, serta dampak pemanfaatan itu harus selalu dievaluasi dan dimonitoring (Lihat: Inayati, 2006;Tanudirjo, 2004)

Pariwisata sebagai bentuk pemanfaatan warisan budaya sesungguhnya justru dapat mawadahi kepentingan berbagai pihak (*stakeholders*). Namun tetap dalam kendali kesadaran, warisan budaya merupakan sumber daya yang sangat terbatas, oleh sebab itu pemanfaatannya juga harus menjaga kelestariannya. Dengan model pariwisata ini, masyarakat lokal menjadi subyek penting untuk terlibat secara penuh. Justru dengan pariwisata, problem pelestarian warisan budaya dan sumberdaya arkeologi memperoleh jalan keluar.

## Cultural Heritage dan Minat Wisatawan di Maluku: Potensi dan Peluang

Perubahan trend minat wisatawan terhadap wisata mengalami perubahan. Wisata minat khusus, wisata budaya berbasis kota, dan wisata pedesaan menjadi wisata yang belakangan banyak diminati. Perubahan ini merupakan dampak globalisasi yang membawa dunia pariwisata dari *mass tourism menjadi new global of tourism* yang lebih mementingkan fleksibilitas dan segmentasi pasar. Di samping itu perubahan gaya hidup juga berdampak pada perubahan dari *mass market ke niche travel*, dari *travel agent ke individual travel* sebagai bentuk inovasi aplikatif dari wisata minat khusus (seperti wisata budaya) dan *ekowisata*.( Ardiwidjaja, 2005: 86).

Rupanya, mengikuti perubahan trend wisata itu, wilayah Maluku sebenarnya telah siap menyambut dengan berbagai potensinya. Hasil survey Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Tahun 2005 menyebutkan wisata budaya menempati poisisi kedua setelah wisata alam dan bahari yang paling menarik minat wisatawan asing berkunjung ke Maluku. Hal ini berarti peluang besar bagi industri wisata untuk mengembangkan obyek warisan budaya /sumberdaya arkeologi. Sumberdaya tersebut menjadi salah satu entitas penting dalam industri wisata jika dikelola secara optimal. Pariwisata Maluku dapat semakin berkembang, dengan pemberdayaan berbagai aset warisan budaya yang sejauh ini masih terpinggirkan. Mengoptimalkan manfaat aset budaya berarti usaha untuk memajupesatkan pembangunan, karena sumberdaya budaya dan sumberdaya arkeologi dapat menjadi modal kuat jika dikelola optimal. Pertanyaannya, sejauh mana warisan budaya itu dapat menjadi konsumsi utama para turis? Berbagai potensi wisata budaya di Maluku sesungguhnya dapat dilirik dalam hal ini.

Pada prinsipnya pariwisata budaya menekankan pada obyek budaya, yang meliputi *living culture* (sosial, ekonomi, politik, bahasa, religi, estetika dan mata pencaharian), *wisdom and tehnologi* ( mata pencaharian, kedamaian, kesenangan, pendidikan, pengetahuan dan tehnologi) serta *culture heritage* yang meliputi *tangible* (artefak, monumen, manuskrip) dan *intangibile* (tradisi dan seni). Bagi Indonesia berdasarkan pengalaman negara maju serta keanekaragaman budaya yang dimiliki, pariwisata budaya lebih tepat jika dikategorikan sebagai landasan yang memayungi berbagai bentuk aktifitas pariwisata baik

yang terkait dengan warisan budaya (*cultural heritage tourism*) maupun terkait dengan warisan itu sendiri (*heritage tourism*). Namun keduanya tetap menekankan pada komponen-komponen budaya baik yang bersifat kesenian maupun huaminities. (ibid, 86-88).

Sejalan dengan itu potensi pengembangan wisata budaya di Maluku juga bisa menyandarkan diri terutama pada kekayaan *cultural heritage* (warisan budaya masa lalu). Maluku masa lalu, menjadi daya tarik karena rempah-rempahnya. Bangsa-bangsa luar, terutama eropa silih berganti berdatangan ke Maluku. Karena itu, Maluku dikenal sebagai daerah yang kaya dengan peninggalan budaya bangsa-bangsa luar itu. Deretan benteng Kolonial berdiri di hampir seluruh wilayah kepulauan Maluku, baik yang masih utuh maupun yang kini tinggal tersisa pondasinya saja. Benteng-benteng yang utuh, sesungguhnya bisa menjadi daya tarik wisata jika keasliannya tetap bertahan. Tercatat sebanyak 42 benteng berdiri di wilayah kepulauan ini, tersebar di wilayah di Maluku dan Maluku Utara.

Khusus untuk wilayah Maluku, daerah-daerah yang dianggap penting pada saat itu diantaranya, Kepulauan Banda, Kepulauan Ambon dan pulau-pulau Lease. Daerah-daerah ini dianggap penting karena merupakan daerah pengumpul dalam perdagangan rempah-rempah sebelum dibawa ke pedagang-pedagang Internasional di Malaka atau langsung ke Eropa. Selain materialnya, catatan ilmiah, sejarah pendirian benteng serta berbagai cerita dramatik di dalamnya yang dikemas sedemikian rupa menjadi peluang menarik untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Beberapa benteng Kolonial yang terbilang utuh dan menarik dikembangkan pemanfaatannya antara lain Benteng Duurstede di Saparua, Benteng Belgica di Pulau Banda, dan Benteng Victoria di Ambon. Selain itu juga di Maluku populer perkampungan-perkampungan tradisional meliputi bangunan maupun kehidupan tradisionalnya, seperti Perkampungan Tanimbar Kei di Maluku Tenggara.

Secara garis besar beberapa sumberdaya arkeologi warisan budaya yang memiliki peluang dan potensi besar untuk dikembangkan antara lain :

1. Benteng-benteng kolonial. Beberapa benteng kolonial hingga sekarang masih utuh. Didalamnya terdapat berbagai informasi, cerita-cerita dramatik yang dapat dikemas sebagai sajian pariwisata yang sangat menarik.

2. Situs-situs Negeri Lama di Maluku. Selain pada situs ini berbagai informasi kebudayaan masa lampau masyarakat Maluku dapat diperoleh, juga pada lokasi situs negeri lama pada umumnya masih menyimpan berbagai tinggalan budaya masa lampau yang bisa menjadi obyek wisata minat khusus, bahkan beberapa diantara negeri-negeri lama tersebut merupakan bekas kerajaan di masa lampau.
3. Perkampungan tradisional. Banyak wilayah-wilayah di Maluku terdapat perkampungan-perkampungan tradisional yang otentisitas masa lampunya masih bertahan. Di perkampungan itu, selain masih bisa dijumpai berbagai pranata budaya masa lampau yang masih dipertahankan juga terdapat berbagai tinggalan arkeologi yang menarik sebagai obyek wisata budaya.
4. Tinggalan dan tradisi megalithik. Maluku terkenal dengan tinggalan megalithik, utamanya dolmen (meja batu) yang hampir tersebar merata di seluruh kepulauan Maluku.
5. Budaya seni cadas pada dinding gua. Wilayah Maluku juga terkenal dengan peninggalan prasejarah situs gua dan benda-benda arkeologi lainnya. Yang menarik beberapa gua juga terdapat lukisan-lukisan dinding atau biasa disebut seni cadas yang menggambarkan tingkah laku masyarakat penghuninya pada masa lampau. Obyek ini juga bisa dikembangkan sebagai obyek wisata. Ditambah lagi, jejeran batu stalaktit dan stalakmit yang artistik menampakkan keindahan panorama gua. Sebagai perbandingan beberapa daerah di Indonesia bagian timur telah mengembangkan situs gua sebagai obyek wisata misalnya di wilayah Sulawesi Selatan. Nampaknya upaya yang sama di Maluku masih tertinggal.

Ke lima obyek utama warisan budaya di wilayah Maluku ini perlu dipikirkan pengembangannya sebagai obyek wisata. Kelima obyek wisata potensial ini memiliki sejumlah peluang untuk memajukesatkan industri pariwisata di Maluku. Beberapa peluang ini antara lain :

- a. Situs-situs budaya tersebut, pada umumnya terletak di wilayah yang terbuka, sehingga Wisatawan dapat berkunjung dalam jumlah besar. Situs-situs tersebut pada umumnya juga memiliki area yang luas, selain di dalamnya juga dapat dijumpai berbagai benda budaya tinggalan masa lampau, juga tersebar di hampir seluruh wilayah Maluku, sehingga wisatawan tidak terkonsentrasi



di satu situs obyek wisata saja. Tentu dengan ini konsep pariwisata berwawasan pelestarian dapat terjaga.

- b. Wisatawan dapat berkunjung ke situs-situs budaya tersebut pada setiap waktu, terutama situs megalithik, situs gua prasejarah dan situs negeri lama. Ketiganya merupakan wilayah-wilayah terbuka yang jadwal kunjungannya lebih mudah disesuaikan dengan kedatangan wisatawan.
- c. Pada obyek-obyek wisata itu juga, dapat dikembangkan berbagai ragam atraksi. Berbagai atraksi lainnya masih mungkin untuk dikembangkan dengan memanfaatkan keadaan alam, daya tarik benda-benda cagar budaya yang ada, dan juga lintas pedesaan di sekitar situs.
- d. Pembukaan jalur *tracking* baru yang memungkinkan dari berbagai penjuru. Pada sebagian wisatawan mancanegara, perjalanan jauh dengan berjalan kaki juga diminati sebagai bagian wisata petualangan. Situs-situs terbuka seperti gua-gua prasejarah, negeri lama dipuncak bukit atau sebaran dolmen di wilayah-wilayah pedalaman mungkin bisa menjadi tantangan wisatawan untuk membuka jalur *tracking*, melewati area-area dengan pemandangan alam yang menarik.
- e. Pengembangan agrowisata di lereng perbukitan terutama pada situs-situs negeri lama. Hal ini merupakan sesuatu yang mungkin dapat dilakukan, lahan-lahan subur di lereng bawah dapat dijadikan perkebunan yang sesuai dengan keadaan iklim setempat.
- f. Investasi swasta untuk pengembangan industri pariwisata. Sangat mungkin, terbuka kesempatan untuk melakukan berbagai investasi bagi pengembangan industri wisata di wilayah situs tersebut. Investasi itu tentunya berkenaan dengan bidang-bidang yang berhubungan dengan kenyamanan wisatawan di lokasi wisata.

Jika dulu, eropa berdatangan, karena rempah-rempahnya, mungkin kini berdatangan karena ingin bernostalgia? Melihat jejak-jejak leluhurnya yang membangun sejarah dan kebudayaan di Maluku. Apakah putra-putra Maluku di negeri Belanda bisa menjadi duta wisata di sana untuk mengembalikan citra Maluku di mata dunia? Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan itu, hasil survei dinas Pariwisata Maluku menyebutkan, wisatawan mancanegara terbanyak berasal dari Belanda. Hal ini karena pada umumnya para wisatawan tersebut ingin

bernostalgia dan memperoleh informasi langsung, mengingat banyaknya putra-putri Maluku yang bermukim di negeri kincir angin itu. Tentu saja, ini sebuah peluang yang patut dikembangkan lebih sistematis. Kerjasama antar pemerintah Maluku dengan pemerintah Belanda, yang memiliki kaitan emosional masa lalu dapat dijalin lebih intensif. Paling tidak, sasaran bidik pariwisata Maluku diarahkan terutama untuk menarik sebanyak mungkin wisatawan Belanda. Diharapkan, terangkai jembatan informasi dari Belanda ke negara-negara Eropa tetangganya, meskipun informasi via satelit tetap dikembangkan. Hasil survey itu juga mencatat negara eropa adalah pasar terbesar pariwisata Maluku. Tentu ini peluang besar pula, untuk mengembangkan sebuah industri pariwisata di Maluku yang bisa menggelembungkan pundi-pundi daerah dari sektor ini.

## **Pariwisata Maluku Hari Ini dan Esok : Masalah dan Tantangan**

### **A. Beberapa Masalah**

Meskipun dapat dicatat banyak peluang yang dapat dimanfaatkan, bukan berarti luput dari permasalahan. Beberapa masalah atau kendala yang dihadapi daerah ini dalam pengembangan industri wisata antara lain :

#### **1. Problem Pembangunan Pasca Konflik.**

Maluku baru mentas dari problem sosial yang banyak melumpuhkan gerak sosial dan laju pemerintahan dan pembangunan. Karena ini, Maluku kini sedang dalam proses membangun formasi menuju tatatan Maluku yang baru, berkelanjutan, berkeadilan sosial dan berorientasi pada pembangunan sumberdaya manusia seutuhnya. Maluku dalam proses rekondisi dan *recovery* segala bidang. Dengan demikian anggaran pembangunan terutama tersedot untuk program-program sosial dan kemanusiaan (*capacity building*) disamping berbagai pembangunan infrastruktur untuk menunjang kebangkitan tiap sektor. Padahal jika aset wisata akan dikembangkan sebagai industri pariwisata, butuh anggaran besar yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah untuk mengembangkan aset tersebut. Oleh karena itu perlu dipikirkan solusi yang paling moderat untuk masalah ini.

## 2. Citra Pariwisata Masih Terpuruk

Akibat problem sosial itu, citra pariwisata Maluku dalam beberapa tahun ini juga terpuruk, sementara program-program pemulihan citra pariwisata juga belum optimal, tentu ini patut menjadi fokus perhatian.

## 3. Perilaku, kesadaran dan peran serta masyarakat masih kurang.

Prinsip pemanfaatan pariwisata berwawasan pelestarian adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun hingga detik ini, pelibatan masyarakat masih sangat kurang, Pemerintah sebagai fasilitator masih berkuat pada paradigma pembangunan yang *top down*. Semestinya masyarakat dapat menjadi subyek utama dalam pengembangan pariwisata. Sementara di pihak masyarakat juga tingkat kesadaran tentang pelestarian warisan budaya masih kurang. Banyak kerusakan situs terjadi akibat tidak pahamnya masyarakat terhadap arti penting warisan budaya tersebut. Ini sebenarnya menjadi lingkaran masalah (*problem cycling*) yang membutuhkan perhatian serius dari para pihak (*stakeholders*).

## 4. Koordinasi antar Instansi sangat lemah.

Sejauh ini banyak instansi kebudayaan di wilayah Maluku baik instansi vertikal maupun di lingkup Pemprov Maluku.. Namun sampai saat ini koordinasi antar instansi sangat lemah. Masing-masing instansi menjalankan agendanya sendiri-sendiri, tak sinergis. Dengan demikian banyak persoalan pengembangan warisan budaya lepas dari perhatian. Banyak contoh kasus kurangnya koordinasi antar instansi, yang tak mungkin diuraikan dalam makalah singkat ini.

## 5. Kekaburan Otentisitas Warisan Budaya .

Secara konseptual dan teknis, akibat rehabilitasi atau pemugaran, banyak bangunan masa lalu kehilangan keasliannya. Banyak pemugaran bangunan-bangunan bersejarah, justru menurunkan nilai pentingnya sumberdaya tersebut, karena pengerjaannya yang menghilangkan otentisitas warisan budaya tersebut. Otomatis, hal ini

menurunkan daya tarik serta minat kunjungan wisatawan. Selain menimbulkan pula praktek pemborosan anggaran. Sesungguhnya ini juga diakibatkan lemahnya kerjasama dan koordinasi antar instansi kebudayaan.

## B. Tantangan

Selain peluang dan potensi warisan budaya yang menarik minat wisatawan seiring perubahan trend global sekaligus merupakan tantangan bagi pemerintah, masyarakat dan kalangan pelaku wisata (developer) untuk mengembangkannya. Di tingkat pemerintah daerah selain regulasi, juga berbagai kelengkapan sarana dan prasarana wisata perlu menjadi perhatian. Tantangan ini dimaksudkan apa yang mampu dilakukan oleh pihak pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi peluang dan potensi untuk mengembangkan industri pariwisata yang bersumber dari obyek warisan budaya di Maluku. Selain itu juga menyangkut beberapa kendala yang semestinya dipikirkan dalam pengembangan sumberdaya arkeologi (warisan budaya) sebagai salah satu entitas industri pariwisata di Maluku.

Dalam kajian pariwisata terdapat 10 komponen yang diperhatikan dan menjadi landasan. Kesepuluh butir komponen tersebut adalah, sebagai berikut:1)..*Setting Geografis*.2).Tingkat Pengelolaan Lingkungan, 3).Keanekaragaman Atraksi 4).Aksesibilitas, 5).Utilitas/Fasilitas, 6).Kelembagaan, 7).Kebijakan,8).Sumber Daya Manusia. 9).Pasar, 10).Hubungan Antar Objek (Tim Litbang, 2003). Di wilayah Maluku ke sepuluh komponen ini merupakan tantangan yang harus dihadapi kemudian dijabarkan dengan berbagai upaya agar potensi sumberdaya budaya semakin mantap sebagai obyek industri pariwisata di daerah ini.

### 1. Setting Geografis

Secara geografis Maluku merupakan daerah kepulauan. Ribuan pulau yang ada dipisahkan dengan lautan luas dan dalam. Tentu saja hal ini merupakan persoalan tersendiri sekaligus tantangan yang dihadapi pemerintah, dunia usaha, wisatawan serta publik secara umum.

## 2. Tingkat Pengelolaan Lingkungan

Di sekitar lokasi obyek wisata lingkungan, kelestarian lingkungan harus terjaga. Hal ini karena lingkungan merupakan salah satu komponen utama untuk mendukung keberadaan obyek wisata.

## 3. Keanekaragaman Atraksi

Inovasi dalam mengembangkan daya tarik obyek wisata budaya perlu dilakukan secara terus-menerus. Secara teoretik atraksi wisata pada umumnya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu: (1) Sumber-sumber atraksi alami (*natural resources*), misalnya air terjun, iklim, danau, hutan rimba dan lain-lain.; (2) Sumber atraksi yang berupa benda/monumen buatan manusia (*man made resources*), misalnya bangunan purbakala, masjid, taman hiburan, monumen, maoseleum, dan lain-lain; (3) Sumber atraksi yang berkenaan dengan aktivitas manusia (*human resources*), misalnya berbagai seni pertunjukan, ritus, keagamaan, festival, upacara tradisi, dan lain-lain (Tim Litbang, 2003). Ketiga jenis atraksi tersebut dapat dikembangkan di berbagai situs (lokasi obyek wisata budaya) di Maluku. Namun, harus tetap diperhatikan pembenahan serta perencanaan untuk pengembangan yang lebih baik, serta menyesuaikan dengan keadaan lingkungan di sekitar obyek warisan budaya tersebut.

## 4. Aksesibilitas

Keterjangkauan lokasi obyek warisan budaya sangat penting diperhatikan. Beberapa situs arkeologi banyak diantaranya terdapat dipedalaman-pedalaman yang masih sulit dijangkau transportasi. Ini sebuah tantangan yang harus dijabarkan dan dijawab secara nyata, meski butuh proses panjang dan lama, dan menyesuaikan dengan kemampuan yang ada. Kecuali benteng-benteng Kolonial yang pada umumnya terdapat di kota ataupun desa yang mudah diakses, beberapa lokasi obyek wisata misalnya situs bekas kerajaan, perkampungan tradisional, obyek wrisan budaya megalithik, gua prasejarah umumnya terletak dipedalaman yang masih sulit dijangkau. Bahkan banyak diantaranya belum tersedia jalan yang bisa dilalui kendaraan roda dua ataupun roda empat , sehingga

untuk mencapai lokasi harus berjalan kaki. Bagi kebanyakan turis, hal ini kendala sendiri dan menimbulkan menurunnya minat berkunjung.

## 5. Kenyamanan (Fresment) =Utilitas/Fasilitas

Di wilayah Maluku, obyek-obyek warisan budaya maih minim dari dukungan fasilitas untuk menambah kenyamanan wisatawan. Dengahn kata lain fasilitas yang berhubungan dengan kenyamanan para wisatawan masih sangat kurang dan terbatas. Di beberapa lokasi wisata budaya, belum ada fasilitas akomodasi dan restoran dalam bentuk yang paling sederhana sekalipun. Karenanya, di masa yang akan datang hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut perlu perencanaan dan penataan yang lebih seksama.

## 6. Kelembagaan

Terdapat beberapa lembaga atau instnasi kebudayaan di wilalayah Maluku baik dalam lingkup Pemerintah Provisi dan daerah maupun instansi vertikal. Namun soal pengelolaan warisan budaya sebagai salah satu obyek wisata, belum ada pembagian peran yang jelas antar instansi tersebut, padahal masing-masing memiliki kepentingan dan juga tugas yang saling berhubungan, bahkan koordinasi dan kerjasamapun hampir tak pernah dilakukan. Akibatnya pengelolaan sumberdaya budaya dilakukan secara sepihak-sepihak, maka hasilnyaupun tak optimal. Pembagian peran, kerjasama dan koordinasi perlu diupayakan melalui berbagai wadah formal, jika perlu dibuatkan semacam nota kesepahaman dan kesepakatan antar instansi sebagai koridor pelaksanaan tugas masing-masing.

## 7. Kebijakan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang perlindungan Benda Cagar Budaya (BCB) secara jelas mengatur soal pemanfaatan, pelestarian serta perlindungan obyek warisan budaya. Namun di tingkat pelaksanaannya tak ada pengawasan yang berarti. Oleh karena itu pemanfaatan

obyek warisan budaya sebagai obyek wisata harus tetap berlandaskan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu dibutuhkan pengawasan bersama dan terkoordinatif.

### 8. Sumber Daya Manusia

Diakui atau tidak, pemerintah daerah tak cukup memiliki SDM yang terampil yang siap menjadi pramuwisata atau pamong wisata. Subyek ini tidak saja memahami bagaimana mengembangkan ketrampilan dalam melayani (*guide tour*) para turis, tapi juga mampu memberi informasi faktual, mengarahkan dan mengetahui seluk beluk peraturan yang berkaitan dengan keberadaan obyek wisata warisan budaya. Selain trampil mengemas, menyajikan obyek wisata juga mampu memberikan pemahaman tentang pengelolaan sumberdaya budaya berwawasan pelestarian dan berbasis masyarakat.

### 9. Pasar

Bicara soal pasar wisata, daerah Maluku sebenarnya telah memiliki pasar yang jelas. Sejak dulu Maluku dikenal sebagai surganya rempah-rempah. Bangsa-bangsa Eropa, sejak dulu telah berdatangan ke wilayah ini untuk menguasai rempah-rempah. Tantangan sekarang ialah bagaimana Maluku sekarang mampu menguasai pasar Eropa soal kunjungan wisatawan asing. Berbagai potensi dapat terus ditangkap dan dipublikasikan ke dunia, dengan berbagai sarana, strategi dan metode penyebarluasan potensi tersebut. Pasar Eropa masih sangat potensial untuk terus dibidik, tentu saja didahului dengan program-program pemulihan citra pariwisata yang terukur, pembenahan segala bentuk kelemahan yang ada sekarang, giat melakukan promosi melalui berbagai event nasional maupun internasional (tentu butuh anggaran besar).

### 10. Hubungan antar Obyek

Obyek warisan budaya sebagai lokasi wisata perlu didukung berbagai obyek wisata lainnya yang saling mendukung dan memperkaya obyek sasaran wisata. Dengan demikian nampak obyek yang dinamis dan menambah daya tarik wisata. Biasanya,

lingkungan sekitar obyek lebih mudah dimanfaatkan untuk itu, dengan tetap mengutamakan pelestarian lingkungan sekitar. Keragaman obyek wisata dalam satu lokasi dapat menambah daya tarik wisata. Beberapa contoh lokasi wisata di beberapa tempat di Indonesia mengembangkan strategi ini. Bahkan dalam kasus pengelolaan Candi Borobudur dan Prambanan, dukungan zonasi taman-taman wisata justru menjadi strategi pelestarian, agar pengunjung tidak seluruhnya terkonsentrasi di obyek wisata utama. Contoh lain, obyek wisata Gua Sumpang Bitu, di Sulawesi Selatan, perhatian pengunjung tidak hanya tertuju untuk memasuki gua dengan berbagai lukisan cadasnya, tetapi juga disodorkan berbagai panorama taman lengkap dengan kolam pemandian dan rumah-rumah mungil tempat beristirahat.

### Membangun Kesadaran Kolektif Publik : *Perencanaan Pembangunan Dari Bawah*

Disadari, hingga saat ini kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap keberadaan sumberdaya budaya dan arkeologi masih sangat kurang. Namun di tempat lain masih banyak pula dijumpai kelompok masyarakat yang sangat mensakralkan sumberdaya budaya/arkeologi disekitar huniannya. Ini berarti kesadaran untuk memelihara dan melestarikan sumberdaya tersebut masih ada. Yang terpenting bagaimana kemudian hal itu didorong menjadi sebuah kesadaran kolektif seluruh masyarakat. Pemerintah sebagai fasilitator tentu saja pihak yang paling bertanggungjawab untuk mendorong keadaran kolektif tersebut. Berbagai program penyadaran masyarakat terhadap pentingnya sumberdaya tersebut penting untuk terus digalakkan. Tak kurang pentingnya, bagaimana menciptakan sumberdaya arkeologi yang mampu memberi keuntungan secara ekonomis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan jaminan ini, bukan mustahil jika akan muncul komunitas-komunitas masyarakat yang sadar untuk melestarikan sumberdaya budaya yang ada sebagai salah satu modal pembangunan.

Pengelolaan sumberdaya arkeologi tak mungkin dijauhkan dari masyarakat. Bahkan dalam konsep Manajemen Sumberdaya Arkeologi, hal ini sesungguhnya untuk kepentingan masa depan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat jati dirinya. Sebagian



besar keberadaan sumberdaya arkeologi tersebut berada di tengah-tengah kehidupan pemukiman masyarakat. Justru karena itu, keterlibatan secara aktif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya arkeologi perlu ditingkatkan. Selama ini paradigma pembangunan oleh pemerintah terkesan *top down*, bersifat sentralistis dan feodal, dimulai dari pemerintah, sedangkan masyarakat menjadi subyek yang hanya patuh dan tunduk terhadap kebijakan pemerintah. Tak jarang praktek ini menjauhi rasa keadilan masyarakat, bahkan seringkali masyarakat hanya menjadi penonton, bahkan sering pula menjadi korban pembangunan. Di era reformasi dan kebebasan berpendapat, seringkali hal ini justru menimbulkan resistensi masyarakat. Oleh karena itu pengelolaan sumberdaya budaya dan arkeologi, perlu merubah paradigma itu, yakni harus dimulai dari masyarakat (*bottom up*) mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunannya. Dengan demikian masyarakat menjadi subyek aktif yang terus berperan dan terlibat mulai dari pelestarian dan perlindungan sumberdaya arkeologi hingga pengembangannya. Jika tahapan ini mampu dipecahkan, angan-angan sumberdaya arkeologi menjadi obyek vital industri pariwisata Maluku, dapat menemui jalan yang lebih lapang ke arah itu. Hal ini karena dukungan kolektif publik yang sangat besar. Bagaimanapun, sebuah industri dapat berkembang tidak saja ditentukan oleh banyaknya dan besarnya pasar, tetapi yang tak kalah pentingnya adalah dukungan publik setempat.

### Skala Prioritas Pengembangan Wisata Maluku

Meski sumberdaya arkeologi seperti yang diuraikan diatas, sangat mungkin dikembangkan menjadi sebuah industri pariwisata, namun hal ini perlu dilakukan secara bertahap. Dalam kondisi pemulihan Maluku saat ini, perlu melakukan pentahapan dengan segera, agar tahap pembangunan selanjutnya dapat dilakukan. Tahapan paling awal pembangunan sumberdaya arkeologi untuk industri wisata yakni melalui skala prioritas pembangunan. Skala prioritas disini dimaksudkan upaya menyeleksi dan memprioritaskan sumberdaya budaya dan sumberdaya arkeologi yang paling menjanjikan untuk dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai obyek wisata. Membuat rangking skala prioritas ini didasari oleh kesadaran sangat terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Jadi sebelum menuju industri pariwisata Maluku, perlu dilakukan pentahapan prioritas

pembangunan wisata yang direncanakan secara matang. Bicara skala prioritas, maka fokusnya soal efisien dan efektif dalam penggunaan anggaran. Hal ini upaya menjawab masalah pada point pertama yang telah diuraikan diatas. Beberapa tolak ukur skala prioritas setidaknya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- **Kriteria kemendesakan**, dalam kriteria ini belanja daerah dialokasikan untuk kebutuhan pembangunan yang benar-benar sangat *urgen* untuk dipenuhi. Dalam soal pembangunan sumberdaya budaya /arkeologi sebagai obyek wisata budaya, maka hendaknya lebih difokuskan terutama pada obyek-obyek arkeologi yang keberadaannya benar-benar terancam.
- **Kriteria akar Masalah / Kebutuhan**, kriteria ini mensyaratkan pada hubungan sebab akibat sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memenuhi kebutuhan di sektor lainya. Dalam pembahasan ini, kriteria ini mensyaratkan agar pembangunan atau pengembangan obyek wisata warisan budaya dapat menjawab permasalahan disekitarnya. Dengan kata lain jika kriteria ini diterapkan dapat mengatasi persoalan lainnya. Sebagai ilustrasi misalnya dapat dikemukakan, jika di sebuah lokasi tertentu dilakukan pemugaran terhadap salah satu obyek wisata, diharapkan berdampak mengatasi persoalan lainnya, baik secara sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitarnya atau mengatasi persoalan lain yang terkait dengan pembangunan tersebut. Peribahasa mengatakan “berikanlan pancing, bukan ikan”.
- **Kriteria Kepentingan Publik**, pembangunan yang dilaksanakan benar-benar mampu memenuhi kebutuhan publik, artinya pembangunan yang dilakukan bukan semata-mata mengejar keuntungan proyek namun benar-benar membawa kemanfaatan bagi masyarakat terutama sekitar obyek warisan budaya.
- **Kriteria Ketersediaan Potensi**, potensi dan sumber daya yang ada dapat mendukung kebutuhan pembangunan, sebab bertendensi pada efisiensi. Ketersediaan potensi ini pula yang

dapat memacu untuk peningkatan swadaya. Oleh sebab itu belanja daerah jika digunakan dengan mempertimbangkan kriteria ini dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

- **Kriteria menambah pendapatan**, dalam kriteria ini jika dihubungkan dengan belanja daerah dimaksudkan bahwa belanja daerah yang digunakan dapat menciptakan hubungan timbalbalik yang positif, yakni belanja yang digunakan dapat digunakan untuk menambah pendapatan. Konkretnya, jika anggaran digunakan untuk pembangunan obyek warisan budaya, ada jaminan bahwa hasil pembangunannya dapat dimanfaatkan untuk memperoleh pendapatan pemerintah maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- **Kriteria Keberlanjutan**. Kriteria keberlanjutan (jangka panjang), artinya belanja daerah yang dikeluarkan menghasilkan dampak yang berkelanjutan sehingga pemerintah daerah tidak perlu melakukan pemborosan untuk kebutuhan yang sama.

Beberapa kriteria tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam rancangan pentahapan awal pembangunan wisata daerah yang bersumber dari obyek warisan budaya. Uraian di atas sebenarnya baru menjawab permasalahan point pertama yakni soal pendanaan/anggaran. Dengan skala dimungkinkan mengurangi atau bahkan menghindari pemborosan atau beban anggaran. Mengidentifikasi atau menentukan skala prioritas merupakan pentahapan awal pembangunan dan pengembangan obyek arkeologi (warisan budaya) menuju industri pariwisata. Pentahapan skala prioritas ini kemudian dikaitkan dengan 10 komponen pariwisata yang telah diuraikan sebelumnya. Dengan strategi ini, kebijakan pembangunan dan pengembangan wisata yang bersumber dari sumberdaya arkeologi (warisan budaya) jadi lebih terarah. Meskipun dengan skala prioritas, secara kuantitas pembangunan yang ada terbatas, namun secara kualitas lebih menjamin eksistensinya bagi industri wisata. Jika hal ini tercapai, secara bertahap pembangunan selanjutnya dapat dijalankan.

Soal citra pariwisata yang masih terpuruk, sesungguhnya tidak hanya menjadi beban pemerintah daerah untuk mengatasinya. Hal ini

karena masalah ini terkait dengan kondisi makro keindonesiaan. Seiring semakin kondusifnya stabilitas keamanan di Indonesia, semakin mantapnya jalannya pemerintahan, otomatis dapat memulihkan citra pariwisata di Nusantara. Meski demikian berbagai jalur komunikasi formal pemerintah daerah sesungguhnya dapat dilakukan, disamping melakukan berbagai promosi dan publikasi. Publikasi dan promosi via internet saat ini lazim dilakukan oleh berbagai negara. Namun jalur efektif lainnya sesungguhnya dapat ditempuh misalnya melalui jalur birokrasi antara pemerintah atau lembaga-lembaga internasional. Tidak hanya pemerintah, publik secara umum melalui Organisasi Non Pemerintah atau NGO juga bisa melakukan jalur-jalur komunikasi personal dengan lembaga-lembaga internasional. Seperti yang telah dicontohkan diatas, secara personal, putra-putri Maluku di luar negeri dapat berperan sebagai duta-duta wisata yang potensial.

Akhirnya dapat disimpulkan, Wilayah Maluku yang kaya sumberdaya arkeologi, dapat mengembangkan potensi tersebut menjadi sebuah industri pariwisata. Hal ini merupakan jawaban alternatif untuk menjawab tantangan ke depan. Daerah tak bisa lagi hanya mengandalkan kekuatan sumberdaya alam yang juga tak terbarui. Berbagai sumberdaya alternatif juga dapat dikembangkan untuk menambah pundi-pundi daerah. Yang terpenting semua itu mendapat dukungan kolektif dari masyarakat, dan berpihak pada masyarakat. Bagaimanapun sebuah industri juga membutuhkan modal yang besar, oleh karena itu pengembangan sumberdaya arkeologi yang ada harus melalui perencanaan matang dan mengedepankan skala prioritas yang efektif dan efisien tanpa mengorbankan pembangunan sektor lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Annonin, 2005

**Laporan Penelitian/Survey Pasar Pariwisata Daerah Maluku dan Profil Wisatawan.** Dinas pariwisata Provinsi Maluku

Anonim, 2005

**Prinsip-Prinsip Pedoman Pengembangan Pariwisata Budaya.** Pusat Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata. Badan Pengembangan Sumber Daya. Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata.

Ardiwijaya, Robby 2005

*Pemberdayaan Masyarakat : Satu model dalam pembangunan pariwisata Berkelanjutan.* **JKP. Jurnal kebudayaan dan pariwisata** Volume XI 2005. Penelitian dan pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.

-----, 2005

*Pengembangan Pariwisata Budaya : Satu Upaya Menggapai Indoesia Ultime Diversity.* **JKP. Jurnal Kebudayaan dan Pariwisata** Volume XII Tahun 2005. ISSN 1410-2463. Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.

Atodudiro, Sumiyati, 2004

*Manajemen Sumberdaya Arkeologi dan Kendala Penerapannya.* Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya UGM. Yaogyakarta. Disampaikan dalam Pelatihan Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi Tingkat Dasar di Trowulan.

Soewoto, Hendro [www.arkeologi.net](http://www.arkeologi.net)

Tanudirjo, Daud Aris, 2004

*Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi : Sebuah Pengantar.* **Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya UGM. Yogyakarta.** Bahan Diskusi untuk Pelatihan Pengelolaan Sumber Daya Arkeologi di Trowulan.

-----, 2006

*Pengantar Pengelolaan Sumberdaya Budaya.* **Jurusan Arkeologi. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Gajah Mada.** Yogyakarta. Bahan Diskusi untuk Pelatihan Pengelolaan Sumberdaya Budaya di Yogyakarta.

Tim Balar Ambon, 2006

**Laporan Kegiatan Diskusi dan Pameran Budaya 2006.** Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Balai Arkeologi Ambon.

Tim Litbang, 2003

*Kajian Pemanfaatan Situs Sebagai Obyek Dan Daya Tarik Wisata.* Kementrian Kebudayaan Dan Pariwisata